

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sektor usaha kecil dan menengah merupakan salah satu sektor potensial yang mendapat perhatian pemerintah dan perlu dikembangkan. Karena sektor usaha kecil dan menengah dapat menjadi peran yang penting di masa mendatang sebagai pelaku ekonomi yang akan memberi kontribusi besar bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Namun permasalahan mendasar yang paling banyak dikeluhkan oleh pelaku usaha kecil dan menengah adalah kesulitan akses untuk mendapatkan permodalan atau keterbatasan jumlah modal dalam pelaksanaan usahanya. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Kemenkop UKM) sendiri menargetkan penyaluran kredit untuk Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada Tahun 2018 sebesar Rp120 triliun dengan jumlah debitur 4 juta. Jumlah ini meningkat dibandingkan dengan tahun 2017.

Pegadaian merupakan lembaga keuangan bukan bank yang memiliki peran dalam membantu permasalahan yang dihadapi pelaku usaha kecil dan menengah melalui penyaluran kredit melalui jasa kredit yang sangat dibutuhkan masyarakat. Dalam peran pegadaian sebagai penyalur kredit untuk usaha kecil dan menengah diharapkan dapat meningkatkan kualitas usaha kecil dan menengah menjadi lebih baik dan membantu pertumbuhan ekonomi.

Dalam penyaluran kredit sering terjadi adanya kredit macet bermasalah seperti kredit macet. Bank Indonesia (BI) sendiri mencatat rasio kredit bermasalah atau *Non Performing Loan (NPL) gross* sedikit meningkat menjadi 2,9 persen pada Januari 2018. Sementara itu, *NPL net* menjadi 1,3 persen pada bulan yang sama. Maka untuk mencegah hal tersebut pegadaian perlu menerapkan suatu prosedur pemberian kredit yang baik disertai dengan sistem pengendalian internal yang efektif.

Masalah keamanan kredit yang diberikan merupakan masalah yang harus diperhatikan oleh pemberi pinjaman, karena ada resiko yang timbul dalam sistem pemberian kredit. Permasalahan ini dapat dihindari dengan adanya pengendalian yang dapat menunjang efektivitas pemberian kredit. Dengan terselenggaranya pengendalian internal yang memadai dalam pemberian kredit, berarti menunjukkan sikap kehati-hatian dan kegiatan usahanya berjalan sesuai dengan visi dan misi perusahaan. Pegadaian melalui usaha pemberian kreditnya harus mampu meningkatkan efektivitas sistem pemberian kredit dan berusaha sebaik mungkin untuk mengurangi resiko kegagalan kredit, terutama akibat lemahnya pengendalian internal.

Alasan perusahaan menyusun pengendalian internal adalah untuk membantu perusahaan dalam menekan atau memperkecil terjadinya kesalahan dan penyelewengan dan agar dapat segera diketahui dan diatasi. Komponen pengendalian internal merupakan proses untuk menghasilkan pengendalian yang memadai. Agar tujuan pengendalian tercapai, perusahaan harus

mempertimbangkan komponen-komponen pengendalian internal. Menurut *Comittee of Sponsoring Organization (COSO)*, Komponen pengendalian internal adalah sebagai berikut *"Internal control include five cayegories of control that management's control objectives will be met. There are five components of internal control: (1) Control Environment, (2) Risk Assessment, (3) Information System, (4) Control activities, (5) monitoring"*.

Dalam usaha mencapai efektivitas sistem pemberian kredit, perlu diketahui tujuan pemberian kredit yang diharapkan. Untuk itu, bagian perkreditan perlu menetapkan kriteria tertentu untuk mencapai tujuan pemberian kredit. Di samping itu, perlu dilaksanakannya prosedur pemberian kredit. Menurut Kasmir (2015) yang meliputi pengajuan proposal, penyelidikan berkas pinjaman, penilaian kelayakan, wawancara pertama, peninjauan ke lokasi (*On the Spot*), wawancara kedua, keputusan kredit, penandatanganan Akad kredit, realisasi kredit. Selain terpenuhinya prinsip dan prosedur pemberian kredit, suatu sistem pemberian kredit dapat dikatakan efektif apabila kredit tersebut dapat kembali sesuai waktu yang ditetapkan dengan sejumlah bunga yang telah ditentukan. Jadi perusahaan dalam bidang perkreditan harus memiliki struktur pengendalian internal yang memadai dalam perkreditan untuk mencegah penyalahgunaan wewenang.

Penulis melakukan penelitian mengingat pentingnya sistem pengendalian internal perusahaan dalam menjalankan kegiatan usahanya untuk mengurangi risiko kegagalan kredit dan kesalahan penyalahgunaan wewenang, maka hal tersebut mendasari penulis untuk melakukan penelitian dengan mengambil judul

“Analisis Peranan Pengendalian Internal dalam Menunjang Efektivitas Prosedur Pemberian Kredit pada Usaha Kecil dan Menengah, Studi kasus pada PT Pegadaian (Persero).”

B. Perumusan Masalah

Dalam latar belakang tersebut, maka dapat dirumuskan masalahnya sebagai berikut:

1. Apakah pengendalian internal prosedur pemberian kredit yang diterapkan sudah efektif?

C. Tujuan dan Manfaat Penulisan

Berikut tujuan dan manfaat dari penelitian yang dilakukan di PT Pegadaian (Persero) adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari dilakukannya penulisan ini adalah untuk mengetahui efektivitas pengendalian internal pemberian kredit yang diterapkan pada PT Pegadaian (Persero).

2. Manfaat Penulisan

Berikut manfaat penelitian yang dilakukan pada PT Pegadaian (Persero), yaitu:

a. Bagi PT Pegadaian (Persero).

Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan evaluasi terhadap pengendalian intern atas kredit untuk mempertahankan ataupun meningkatkan pengendalian internal yang ada guna menekan tingkat kredit macet yang dapat terjadi.

b. Bagi Mahasiswa Universitas Negeri Jakarta

Penelitian ini dapat menjadi referensi pustaka dan menambah wawasan mengenai pentingnya pengendalian internal dalam pemberian kredit.

c. Bagi Penulis

Penelitian ini memberikan gambaran umum pentingnya pengendalian internal dan juga memberikan pengetahuan mengenai prosedur pemberian kredit.